

# **Indonesia -**

# **Corruption Perception Index 2017**

## Economist Intelligence Unit/EIU

(Country Risk Rating):

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tdk akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi Badan Audit
- Independensi Peradilan
- Kebiasaan suap u/ kontrak

37

## International Country Risk Guide:

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

50

## Bertlesmann Transformation Index:

37

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

41

## IMD world Competitiveness:

- Eksistensi Suap dan Korupsi

## Global Insight (Country Risk Rating):

- Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)
- Assessmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinian dan regulasi pendukung

35

## World Economic Forum - Executive Opinion Survey:

- Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusan pengadilan?
- Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu atau kelompok terkait korupsi?

50

CPI SCORE  
2017:  
37 (96/180)

PERC:

32

- Persepsi korupsi sektor publik :
  - a. Pimpinan politik nasional dan lokal
  - b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

20

## World Justice Project:

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

# Siapa Berperan terhadap Indeks Persepsi Korupsi?



## Economist Intelligence Unit/EIU

(Country Risk Rating):

- KPK
- BPK dan APIP
- Komite ASN, Kemenpan RB
- Mahkamah Agung
- Swasta

## International Country Risk Guide:

- Kemendag, BC, pajak, POLRI, Perbankan
- DPR, DPRD, DPD

## World Economic Forum - Executive Opinion Survey:

- Kemendag, BC, pajak, pengadilan
- ORI & APIP
- Pelayanan Publik
- Swasta

## Bertlesmann Transformation Index:

- KPK dan Aparat Penegak Hukum + BPK
- APIP
- Komisi Pengawas

CPI SCORE  
2017:  
37 (96/180)

## IMD world Competitiveness:

- KPK (Pencegahan), ORI & APIP
- Pelayanan Publik
- Swasta

## Global Insight (Country Risk Rating):

- KPK (Pencegahan), ORI & APIP
- Pelayanan Publik
- Swasta

## PERC:

- DPR, DPPRD, DPD
- ASN
- Pelayanan Publik
- POLRI/Militer, MA, Bea Cukai, Pajak, APIP dan Komite Pengawas

## World Justice Project:

- KPK dan Aparat Penegak Hukum + BPK
- Eksekutif,
- Yudikatif,
- Legislatif
- Polisi/Militer

# **Kontribusi KPK untuk perbaikan CPI (2018)**

# Rencana Kerja 2018

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola dan transparansi akan diperluas cakupannya                                      | 6 | Peningkatan kesadaran PNS untuk melaporkan gratifikasi melalui peningkatan efektifitas unit pengelola gratifikasi dan kampanye. |
| 2 | Pencegahan korupsi di sektor swasta : Sosialisasi panduan, Sosialisasi Perma 13/2016, Komite Advokasi Regional <i>Certified Integrity Officer</i> | 7 | Peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil kajian   |
| 3 | Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi-Stranas AK melalui sekretariat di Kedeputian Pencegahan KPK.  | 8 | Implementasi pendidikan anti korupsi di segala jenjang termasuk perbaikan tata kelola perguruan tinggi dan sekolah              |
| 4 | Perluasan keterlibatan masyarakat melalui pengayaan materi platform JAGA termasuk JAGA Desa untuk pemantauan dana desa.                           | 9 | Kampanye anti korupsi yang lebih luas termasuk bekerjasama dengan TVRI dan RRI.   |
| 5 | Peningkatan upaya kepatuhan penyampaian LHKPN berupa peningkatan pemeriksaan LHKPN berbasis resiko dari 400 menjadi 450 LHKPN                     |   |   |

# Program Pemberantasan Korupsi 2018 (Koordinasi dengan Pemerintah)

1. Pengadaan barang dan jasa
2. Perizinan
3. Penerimaan negara
4. Tata kelola niaga/impor
5. Penegakan hukum
6. Daerah

KOLABORASI 4 LEMBAGA:



Perpres dan Rencana Aksi dalam proses finalisasi

# Sekretariat Nasional PPK

Presiden selaku Kepala Pemerintah bersama Pimpinan KPK membentuk Tim Strategi Nasional Anti Korupsi

Tim Strategi Nasional Anti Korupsi KPK, Bappenas, KSP menentukan fokus dan prioritas

## Sekretariat

Eselon 1 menjadi pengurus dengan KPK sebagai koordinator pengurus.

Pengurus dibantu sejumlah personil yang dapat berasal dari K/L maupun luar K/L.

## Pemangku Kepentingan

Sekretariat berkoordinasi dengan K/L/D, CSO, Universitas, Sekretariat lain, dan Donor.

K/L/D melaksanakan upaya anti korupsi.



Bappenas, KSP,  
KPK, Kemendagri

Pengurus: KPK (koordinator), Bappenas, KSP

Administrasi

Litbang

Pokja A

Pokja B

Pokja C

Pokja D

K/L/D

CSO

Universitas

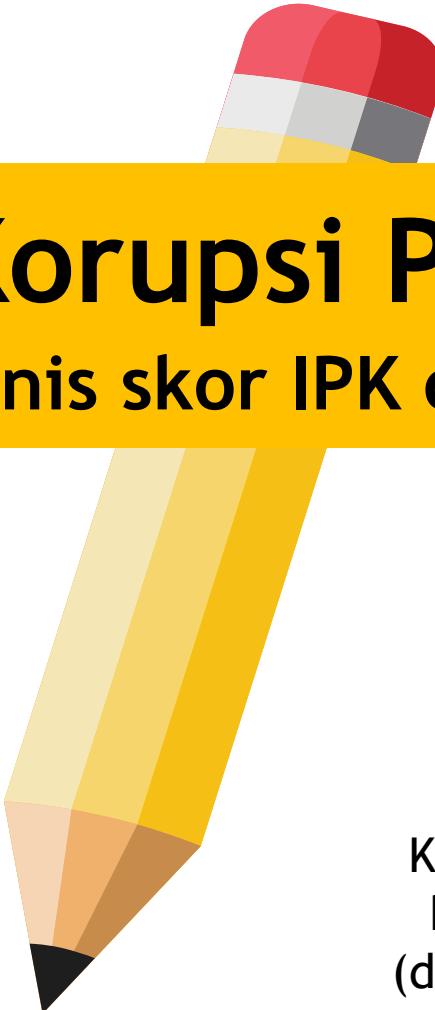
Sekretariat lain

Donor

## Area Korupsi Politik (aspek teknis skor IPK oleh BTI)

4 elemen dari integritas parpol:

- Kode etik dan implementasinya
- Kaderisasi yang terbuka
- Rekrutmen pejabat public
- Pendanaan partai transparan & akuntabel

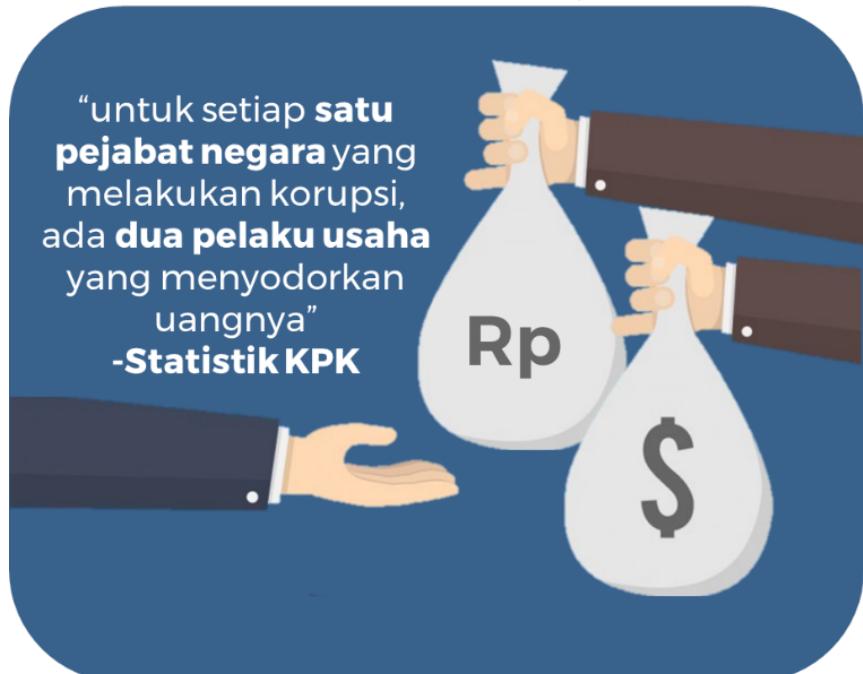


KPK akan memberikan pembekalan khusus pada 575 pasang calon di 10 provinsi

KPK menginisiasi kenaikan bantuan keuangan pemerintah ke partai  
(dari awalnya Rp 108/suara menjadi  
Rp 1000/suara)

# Sektor Swasta

(*World Competitiveness Yearbook*)



2016



5

2017



Terbit Peraturan  
Mahkamah Agung No.  
13

Bersama KADIN  
membentuk Komite  
Advokasi Daerah di 8  
provinsi

SNI ISO 37001:2016  
Sistem Manajemen Anti  
Suap



Sektor Strategis

Migas, Kehutanan, Pangan,  
Kesehatan, dan Infrastruktur

# Call to Action

- ▶ Putting in place laws and institutions that will prevent corruption from happening in the first place
- ▶ Reducing impunity for the corrupt.
- ▶ Improving space for civil society to speak out.
- ▶ Improving integrity and values.

## Note for CPI 2017

- ▶ Similarly, Indonesia has a long way to go in the fight against corruption. However, it too climbed up the index, moving from 32 to 37 in the last five years, an overall increase of five points. This slight improvement could stem from the work of [Indonesia's leading anti-corruption agency](#) in taking action against corrupt individuals, despite [strong opposition](#) from the government and parliament.

# Seruan Tindakan

- ▶ Membuat dasar hukum dan menciptakan kelembagaan yg mampu mencegah terjadinya korupsi
- ▶ Menegakkan hukum secara konsisten kepada koruptor
- ▶ Memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk menyatakan pendapat
- ▶ Meningkatkan integritas dan nilai-nilai baik

## Catatan CPI 2017

- ▶ Indonesia punya sejarah panjang dalam pemberantasan korupsi. Indonesia telah berhasil meningkatkan nilainya dari 32 ke 37 dalam 5 tahun terakhir (secara umum terdapat peningkatan sebanyak 5 poin). Peningkatan ini diperoleh dari kerja lembaga anti korupsi yang melakukan penindakan terhadap koruptor, meskipun terdapat penentangan yang kuat dari pemerintah dan parlemen.

# **TERIMA KASIH**